

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

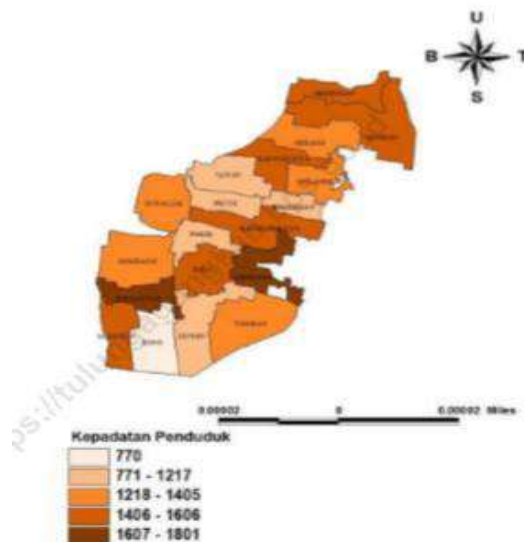
#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil Kecamatan Pakel

Kecamatan Pakel merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Kecamatan Pakel adalah 36,10 Km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kecamatan Pakel di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gondang, sebelah timur Kecamatan Boyolangu, sebelah selatan Kecamatan Campurdarat dan sebelah barat adalah Kecamatan Bandung.

**Gambar 4.1.**

**Peta Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung**



Sumber: Kecamatan Pakel Dalam Angka 2019<sup>68</sup>

<sup>68</sup> BPS Tulungagung, *Kecamatan Pakel Dalam Angka 2019*, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2019), hal. 7

## 2. Kondisi Geografis

Kecamatan Pakel merupakan kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung. Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Pakel yang mempunyai wilayah terluas adalah desa Gesikan yang mempunyai luas wilayah 3,74 Km<sup>2</sup> dan yang mempunyai wilayah tersempit adalah desa Kasreman dengan luas wilayah 0,87 Km<sup>2</sup>. Sedangkan bila dilihat dari jumlah penduduk, ternyata yang punya jumlah penduduk terbanyak adalah desa Gesikan dan yang punya penduduk paling sedikit adalah desa Kasreman. Menurut statusnya, 19 desa di kecamatan ini berstatus desa, namun bila dilihat dari penggunaannya lahan di kecamatan Pakel terbagi menjadi lahan tanah sawah dan lahan tanah kering dengan luas masing-masing 2.191,31 Ha dan 1.418,51 Ha.

**Tabel 4.1**

**Nama-nama Desa di Kecamatan Pakel dan Luas Wilayah**

No.	Nama Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
1.	Sambitan	1,45	4,01
2.	Bono	2,80	5,75
3.	Sukoanyar	1,36	3,76
4.	Duwet	1,51	6,94
5.	Tamban	2,77	7,67
6.	Ngebong	1,54	4,25
7.	Sodo	1,76	4,86
8.	Gombang	2,72	7,54
9.	Pakel	1,18	2,28
10.	Suwaluh	1,85	5,12
11.	Pecuk	1,19	3,30

12.	Bangunmulyo	2,44	6,76
13.	Kasreman	0,87	2,42
14.	Sanan	1,94	5,37
15.	Bangunjaya	2,02	5,60
16.	Ngrance	1,52	4,20
17.	Gebang	1,76	4,87
18.	Gesikan	3,74	10,37
19.	Gempolan	1,41	3,91
<b>Pakel</b>		<b>36,10</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kecamatan Pakel Dalam Angka 2019<sup>69</sup>*

### 3. Kondisi Demografis

Salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran penduduk, serta masalah kualitas penduduk sebagai pendukung pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitasnya baik. Namun sebaliknya, dapat juga menjadi beban pembangunan apabila kualitasnya rendah. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi menuntut penyediaan lapangan kerja dan fasilitas-fasilitas sosial, misalnya perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah tersebut. Usaha-usaha tersebut antara lain program KB untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk, program transmigrasi yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk, wajib belajar 12 tahun serta program-program lainnya. Selain itu dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, ...hal. 5

mempunyai kewenangan untuk mengatur ulang daerahnya. Dalam arti program mana yang diutamakan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk tersebut.

Penduduk Kecamatan Pakel tahun 2018 menurut hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 50.758 jiwa yang terbagi atas laki-laki 24.479 jiwa dan perempuan 26.279 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.405 jiwa/km<sup>2</sup>. Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kecamatan Pakel. Hal ini bisa dilihat dari kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 1.700 jiwa/ namun di sisi lain ada yang kurang dari 800 jiwa/ . Ditinjau dari sumber penghasilan utama rumah tangga, ternyata di Kecamatan Pakel yang terbesar adalah sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar luas wilayah Kecamatan Pakel adalah lahan pertanian.

**Tabel 4.2**

**Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sambitan	982	1085	2067
2.	Bono	1065	982	2047
3.	Sukoanyar	1117	1115	2232
4.	Duwet	1320	1468	2788
5.	Tamban	1717	1883	3601
6.	Ngebong	1478	1561	3039
7.	Sodo	1508	1634	3142
8.	Gombang	1638	1822	3461
9.	Pakel	617	667	1284
10.	Suwaluh	1073	1176	2249
11.	Pecuk	603	687	1290
12.	Bangunmulyo	1537	1727	3264
13.	Kasreman	514	549	1063
14.	Sanan	1108	1125	2233

15.	Bangunjaya	1427	1546	2973
16.	Ngrance	1040	1130	2170
17.	Gebang	1105	1239	2344
18.	Gesikan	3062	3302	6365
19.	Gempolan	1568	1581	3149
<b>Jumlah</b>		<b>24479</b>	<b>26279</b>	<b>50761</b>

*Sumber: Kecamatan Pakel Dalam Angka 2019<sup>70</sup>*

#### 4. Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu wilayah/daerah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintaha yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka peran Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung situasi dan kondisi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi.

Unit Pemerintahan Daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis ke dalam desa/kelurahan. Kecamatan Pakel terbagi habis ke dalam 19 desa, 89 Rukun Warga (RW) dan 316 Rukun Tetangga (RT). Desa yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, ...hal. 79

mempunyai jumlah RT terbanyak adalah Desa Gesikan sebanyak 30 RT, sedangkan yang mempunyai jumlah RT paling sedikit adalah Desa Kasreman sebanyak 8 RT.

Pemerintahan Daerah akan berjalan baik apabila tersedia aparatur pemerintah yang memadai. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi jumlah. Tidak seluruh perangkat desa/kelurahan terisi, namun hal ini bukanlah halangan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan, apabila tenaga yang ada dioptimalkan, dan ini merupakan pemecahan masalah saat ini.

Pemerintahan kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari sistem pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu ada beberapa pegawai di dinas kabupaten yang ditugaskan di kecamatan. Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Pakel berjumlah 762 terbagi atas golongan I, II, III, IV, dan kontrak masing-masing sebanyak 10 orang, 147 orang, 199 orang, 306 orang, 92 orang, dan 9 orang.

**Tabel 4.3**

**Dusun/Lingkungan, RW, RT Menurut Desa**

No.	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Sambitan	2	4	11
2.	Bono	2	4	14
3.	Sukoanyar	2	2	11
4.	Duwet	3	6	19
5.	Tamban	4	8	26
6.	Ngebong	2	4	18
7.	Sodo	3	4	16
8.	Gombang	4	4	28
9.	Pakel	2	3	9
10.	Suwaluh	3	8	17
11.	Pecuk	2	4	10
12.	Bangunmulyo	3	7	19

13.	Kasreman	1	4	8
14.	Sanan	2	4	14
15.	Bangunjaya	3	6	22
16.	Ngrance	2	3	10
17.	Gebang	2	4	16
18.	Gesikan	2	6	30
19.	Gempolan	1	4	18
<b>Pakel</b>		<b>45</b>	<b>89</b>	<b>316</b>

*Sumber: Kecamatan Pakel Dalam Angka 2019<sup>71</sup>*

## 5. Pertanian

Dalam pembangunan yang semakin pesat di berbagai bidang terutama di sektor pertanian membutuhkan faktor-faktor pendukung guna meningkatkan hasil produksi, khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dengan didukung teknologi pertanian yang memadai.

Data pertanian tanaman bahan makanan meliputi luas panen, produksi, produktifitas dari tanaman padi, palawija, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Di samping itu juga meliputi data penangkar dan produksi bibit jeruk dan jumlah alat-alat pertanian. Data ini merupakan data sekunder dari Dinas Pertanian.

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan. Dari data yang tersedia dapat diketahui bahwa di Kecamatan Pakel untuk tanaman pangan yang paling besar adalah tanaman padi dengan luas 7.006 Ha, yang kedua adalah tanaman jagung dengan luas 305 Ha. Sedangkan kelompok sayuran yang paling luas adalah bayam yaitu seluas 12 Ha, yang kedua cabe dengan luas 9 Ha dan ketiga kacang panjang seluas 2 Ha.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, ...hal. 68

Tabel 4.4

**Luas Tanam dan Produksi Padi, Palawija dan Sayur-sayuran  
Menurut Jenisnya**

No.	Desa	Padi dan Palawija		Sayur-sayuran		
		Padi	Jagung	Cabe	Tomat	Bayam
1.	Sambitan	323	-	-	-	-
2.	Bono	475	-	-	-	1
3.	Sukoanyar	233	7	-	-	-
4.	Duwet	595	-	1	-	-
5.	Tamban	681	35	2	1	1
6.	Ngebong	331	16	-	-	-
7.	Sodo	325	-	-	-	-
8.	Gombang	558	-	-	-	-
9.	Pakel	200	-	1	1	-
10.	Suwaluh	379	-	-	-	-
11.	Pecuk	208	-	-	-	-
12.	Bangunmulyo	485	8	-	-	1
13.	Kasreman	169	-	-	1	-
14.	Sanan	311	-	-	-	-
15.	Bangunjaya	274	3	-	-	-
16.	Ngrance	294	28	1	1	-
17.	Gebang	298	39	1	1	1
18.	Gesikan	693	151	2	1	5
19.	Gempolan	174	18	1	-	3
	<b>Pakel</b>	<b>7006</b>	<b>305</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Sumber: Kecamatan Pakel Dalam Angka, 2018<sup>72</sup>

## 6. Profil BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel

### a. Sejarah Berdirinya BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel

Kecamatan Pakel berada di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hampir sebagian besar luas wilayahnya merupakan lahan pertanian. Namun, dengan potensi yang dimilikinya belum mampu memberikan kesejahteraan yang nyata untuk sebagian masyarakatnya. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan

<sup>72</sup> *Ibid.*, ...hal. 48



nasional sampai ke desa-desa, pemerintah membentuk PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Program ini dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Kecamatan Pakel merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang mendapatkan bantuan dari program PNPM Mpd pada tahun 2009. Dana tersebut merupakan dana hibah yang untuk kegiatan di bidang ekonomi bagi masyarakat desa. Bantuan dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan pra sarana, kegiatan simpan pinjam masyarakat dan pelatihan.

Program PNPM-MPd berakhir pada tahun 2014. Namun, pemerintah memberikan kebijakan untuk tetap melanjutkan program PNPM-MPd, terutama program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program PNPM di Kecamatan Pakel berakhir pada tahun 2014. Dari tahun 2015 – 2018 merupakan masa transisi sampai akhirnya menjadi BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.

Pada masa transisi tersebut, tepatnya pada tahun 2015 muncul program Dana Desa. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan yang tercantum

dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang akhirnya program peningkatan infrastruktur diberikan ke desa.

Selanjutnya, kegiatan PNPM tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Maka pada tahun 2018 di Kecamatan Pakel sebagai kelanjutan program ex-PNPM resmi berubah menjadi BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masih berjalan sampai dengan sekarang, dan juga terdapat program pembiayaan bagi masyarakat yang dapat dikembangkan ke sektor usaha, peternakan, dan sektor-sektor lain yang memungkinkan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Lokasi

BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel terletak di Dusun Krajan RT 01/RW 01 Desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Di sebelah timur Kantor Kecamatan Pakel dan di sebelah utara Aula Kantor Kecamatan Pakel.

c. Visi, Misi dan Tujuan

Visi PPO Kecamatan Pakel

“Menciptakan tumbuhnya perekonomian masyarakat Kecamatan Pakel yang mandiri didukung dengan tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka.”

Misi PPO Kecamatan Pakel

- 1) Membantu masyarakat dengan menyediakan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pakel.
- 2) Mendorong masyarakat untuk berinisiatif dalam pengembangan usaha.
- 3) Pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat Kecamatan Pakel untuk berusaha peningkatan pendapatan dengan pelatihan wirausaha.

#### Tujuan PPO Kecamatan Pakel

“Membantu pemerintah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat Kecamatan Pakel melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Pakel.”

#### d. Struktur Organisasi

##### Pengurus Pengelola Operasional (PPO)

- Ketua : Dian Susanto, SE
- Sekretaris : Syukron MT
- Bendahara : Kiptiyah
- Staff : Hartatik

### Badan Pengawas (BP)

- Ketua : Sadimun, S.Pd
- Anggota : Lina Noviati
- Anggota : Arif Hamroni

### Tim Verifikasi

- Ketua : Mukhlisin
- Anggota : Titin Ismiati

### Tim Pendanaan

- Ketua : Mujianto
- Wakil Kepala Desa : Sujianto, SE
- Tokoh Masyarakat : Mobin
- Wakil Kelompok : Wiwik Yulianti dan Prima Yunita

#### e. Unit Usaha BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel

##### 1. Unit Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam adalah memberikan pelayanan berupa penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari atau sebagai modal usaha. Yang termasuk unit simpan pinjam di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

##### 2. Unit Pembiayaan

Unit usaha pembiayaan merupakan layanan pemberian kredit dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

Apabila ada masyarakat yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk usahanya tapi kekurangan biaya, maka bisa mengajukan pembiayaan kredit di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Pihak BUM Desa akan mencarikan barang tertentu yang dibutuhkan. Lalu dari pihak yang mengajukan, akan membayar barang tersebut dengan cara mengangsur tiap bulan sampai lunas.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian adalah segala bentuk hasil temuan yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode-metode yang telah dipaparkan sebelumnya. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan mengamati kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel.

BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel melakukan kegiatan SPP untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat melalui pemberdayaan perempuan. Lewat SPP, pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan kemampuan dan wawasan kelompok ibu rumah tangga di Pakel.

Dalam penelitian yang telah dilakukan di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel, dijelaskan mengenai beberapa hasil jawaban dari para informan yaitu Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Pengurus Operasional BUM Desa Bersama dan Bapak Syukron MT selaku

Sekretaris. Sedangkan dari pihak Kelompok SPP, peneliti mewawancarai Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang, Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh dan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar.

### **1. Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengelolaan Hasil Jasa di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel**

Tujuan dari program pemberdayaan adalah peningkatan dari segi modal, sumber daya manusia dan kemandirian rumah tangga. Pemberian pinjaman modal serta pelatihan diadakan dalam rangka meningkatkan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program pemberdayaan perempuan yang dilakukan di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.

“Awal mula program PNPM di Pakel itu pada tahun 2009 mendapatkan dana hibah yang diperuntukkan membangun sarana prasarana, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Lalu pada tahun 2014 ada pengakhiran PNPM, selama 2015 s/d 2018 transisi sehingga pada tahun 2018 resmi bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.”<sup>73</sup>

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.

“Bumdesma Kecamatan Pakel merupakan transformasi dari eks. PNPM Mandiri Pedesaan. Modal berawal dari dana PNPM-Mandiri Pedesaan untuk Tulungagung dalam kurun 2009 – 2014

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

yang digunakan untuk pengembangan di bidang perekonomian dan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Sejak program PNPM-Mandiri Pedesaan berakhir, akhirnya bertransformasi menjadi bumdes bersama, sampai dengan sekarang.”<sup>74</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program awal dari PNPM dan satu-satunya yang tetap dilanjutkan setelah bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama.

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pinjaman bergulir untuk membantu kelompok ibu rumah tangga mengembangkan usaha atau membuka usaha baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel menjelaskan.

“Kegiatan SPP adalah kegiatan pemberian pinjaman modal itu, yang diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga. Nanti bisa dipakai untuk modal usaha.”<sup>75</sup>

Bapak Syukron MT juga menjelaskan.

“Jadi SPP itu memberikan bantuan pinjaman permodalan untuk pemberdayaan perempuan, digunakan untuk membantu usaha kelompok ibu rumah tangga di Pakel.”<sup>76</sup>

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diberikan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar dapat menjalankan usaha. Dengan pinjaman ini, diharapkan ibu rumah tangga dapat membantu perekonomian rumah tangganya.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 23 November 2020

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 07 November 2021

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 09 November 2021

Bagaimana kelompok Ibu-ibu mengetahui program SPP? Ibu Ariek Setyowati menjelaskan.

“Saya mengetahui SPP awalnya dari sosialisasi di desa yang disampaikan oleh pengurus upk bumdesma kecamatan Pakel. Saya sudah 4 tahun gabung dengan kelompok SPP”<sup>77</sup>

Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh menjelaskan hal yang sama.

“Saya tau dari sosialisasi di desa, mbak. Saya sudah 5 taun lebih jd ketua. Rodok lali pas e.”<sup>78</sup>

Keterangan berbeda didapat dari Ibu Ida yang merupakan Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar.

“Saya mendengar soal program spp ini tidak dari sosialisasi, tapi dari teman saya yang meminjam, mbak. Sudah 8 thn gabung kelompok SPP.”<sup>79</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa awal pengenalan program SPP di Kecamatan Pakel melalui sosialisasi dari pihak BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel ke desa-desa di Kecamatan Pakel. Tidak semua masyarakat datang ke kantor desa untuk sosialisasi program pinjaman dana bergulir ini, sebagian mendengar kabar dari orang yang mengikuti sosialisasi atau dari kabar yang tersebar dari mulut ke mulut. Program pinjaman dana bergulir bertujuan untuk memberikan bantuan dana mudah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha. Lewat sosialisasi dan kabar

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar pada tanggal 3 Desember 2020



yang tersebar, menarik minat masyarakat yang membutuhkan untuk mengajukan pinjaman ke BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.

Upaya yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel untuk kelompok SPP adalah dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan para ibu rumah tangga. Pihak BUM Desa Bersama memfasilitasi kegiatan pelatihan atau kunjungan usaha untuk kelompok SPP. Hal ini dilakukan agar ibu-ibu kelompok SPP dapat menambah keterampilan, kreatifitas dan memberikan referensi usaha. Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel menjelaskan.

“Ada dana dari hasil usaha untuk *capacity building* atau peningkatan kapasitas yang digunakan untuk mengadakan pelatihan atau studi banding ke tempat usaha. Bumdes pernah mengadakan pelatihan menjahit, bordir dan pengolahan makanan. Kita pernah kunjungan usaha ke tempat-tempat usaha seperti kampung coklat.”<sup>80</sup>

Penjelasan ini diperkuat oleh Bapak Syukron MT sebagai Sekretaris di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.

“Kalau peningkatan kapasitas itu seperti pelatihan atau studi orientasi. Dulu pernah pelatihan masakan kue, jahit, buat hiasan di taplak meja. Studi orientasi juga pernah ke kerajinan, industri kecil, peternakan.”<sup>81</sup>

Untuk memperkuat pendapat dari pihak BUM Desa Bersama, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa ketua kelompok

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 07 November 2021

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 23 November 2020

SPP. Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang menjelaskan.

“Pernah ikut kunjungan ke kampung coklat, belajar cara pembuatan aneka kue dari coklat dan kunjungan ke rumah produksi Jenang Lasimun.”<sup>82</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh.

“Pernah diajak kunjungan ke Jenang Lasimun. Pas aku jadi ketua aku pas hamil mbak jadi ndak ikut Trs aku lahiran aku ikut sekali habis itu pandemi.”<sup>83</sup>

Pemberdayaan perempuan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan agar ibu-ibu rumah tangga dapat meningkatkan kemampuan dan mampu membangun usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat membuka pandangan atau pola pikir kaum perempuan di Kecamatan Pakel karena mayoritas memiliki pendidikan yang rendah sehingga sulit menyerap informasi yang tersebar di media. Sehingga dengan pelatihan dan kunjungan usaha yang dilakukan menambah keterampilan juga menambah wawasan.

Proses selanjutnya dari pemberdayaan perempuan dalam program SPP adalah mendampingi kelompok ibu rumah tangga dalam menjalankan usahanya. Pendampingan di sini dilakukan oleh pihak BUM Desa Bersama untuk memantau bagaimana usaha yang

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 07 November 2021

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 02 November 2021

dijalankan dan membantu jika ada dari kelompok SPP yang kesulitan dalam usahanya. Bapak Dian Susanto, SE menjelaskan.

“Selain memberikan pinjaman, bumdes juga mendampingi kelompok SPP. Kita mencoba memahami apa yang dibutuhkan oleh kelompok SPP. Kalau butuh pelatihan, maka pelatihan apa yang dibutuhkan nanti kita memfasilitasi.”<sup>84</sup>  
Bapak Syukron MT menambahkan.

“Kita mencoba memahami apa yang dibutuhkan dari kelompok SPP. Misal usaha peternakan, kita adakan pelatihan pengolahan pakan ternak. Apa yang dibutuhkan, kita berusaha menyediakan. Untuk sekarang kita lebih banyak memfasilitasi studi banding, supaya ibu-ibu tau bagaimana cara pemasaran lewat *online*.”<sup>85</sup>

Peneliti juga menambahkan keterangan dari Ibu Ariek Setyowati yang menjelaskan.

“Setau saya pengurus bumdes memantau kegiatan kelompok dari pengajuan proposal, verifikasi kelompok, pencairan/penyaluran sampai pengembalian angsuran tiap bulannya.”<sup>86</sup>

Dari keterangan di atas, Ibu Ariek mengetahui bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan BUM Desa Bersama pada pendampingan pengajuan pinjaman sampai selesai.. Ibu Nurhidayati menambahkan.

“Pendampingan dari bumdes itu ya pas minjem SPP sampai selesai pelunasan mbak.”<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 07 November 2021

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 09 November 2021

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 07 November 2021

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 08 November 2021

Pendampingan yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel adalah memantau dan mengawasi kegiatan SPP dari mulai proses pengajuan proposal sampai dengan pelunasan.

Setelah masyarakat mengetahui tentang program SPP. Maka apa saja syarat untuk dapat mengajukan pinjaman SPP? Bapak Dian Susanto, SE menjelaskan.

“Masyarakat harus membentuk kelompok dan mendapat ijin dari suami. Karena ini kan pinjaman khusus untuk perempuan.”<sup>88</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Syukron MT.

“Untuk SPP harus membentuk kelompok terlebih dahulu, minimal 5 orang.”<sup>89</sup>

Selanjutnya Bapak Dian Susanto, SE juga menambahkan mekanisme pinjaman SPP di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.

“Setelah membentuk kelompok, baru bisa melanjutkan membuat proposal, lalu diverifikasi oleh tim verifikasi, setelah diverifikasi selanjutnya dibahas oleh tim pendanaan. Hasil dari tim pendanaan itulah yang menjadi dasar pencairan dana ke kelompok-kelompok tersebut.”<sup>90</sup>

Bapak Syukron MT juga menjelaskan sebagai berikut.

“Kelompok SPP harus membuat proposal untuk perguliran SPP dengan persetujuan Kepala Desa, selanjutnya dilakukan verifikasi langsung ke anggota oleh tim verifikasi, diadakan musyawarah pendanaan untuk memutuskan perguliran dana, pencairan kelompok sesuai dengan hasil keputusan dari musyawarah

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 23 November 2020

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

pendanaan. Dari proses pengajuan sampai pencairan jangka waktunya kurang lebih sebulan.”<sup>91</sup>

Keterangan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang.

“Proses pengajuannya mudah. Warga desa setempat disetujui oleh suami selaku penjamin, memiliki usaha walaupun levelnya kecil-kecilan. Proposal kelompok dibawa ke desa untuk meminta persetujuan dari Kepala Desa, kemudian di verifikasi oleh tim bumdesma kecamatan layak atau tidaknya memperoleh pinjaman.”<sup>92</sup>

Berikut keterangan dari Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh.

“Buat proposal dulu, dikumpulkan ke UPK, terus diverifikasi. Terus nunggu pencairan.”<sup>93</sup>

Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar.

“Membuat proposal pinjaman, persyaratannya cuman KTP suami istri.”<sup>94</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa untuk pengajuan pinjaman SPP, pertama-tama membuat proposal pengajuan pinjaman terlebih dahulu. Dalam proposal terdapat informasi tentang anggota kelompok, seperti identitas, pekerjaan, jumlah pinjaman yang diajukan, serta fotocopy KTP suami (selaku penjamin) dan istri

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 23 November 2020

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar pada tanggal 3 Desember 2020

(selaku anggota kelompok). Proposal pinjaman diberikan ke pihak BUM Desa Bersama untuk diperiksa secara administrasi, selanjutnya akan diverifikasi secara langsung oleh tim verifikasi dari BUM Desa Bersama dengan bertemu kelompok-kelompok SPP yang telah mengajukan proposal. Hasil verifikasi diberikan kepada tim pendanaan. Hasil dari tim pendanaan yang akan menjadi dasar keputusan pencairan dana pinjaman. Dari proses pengajuan sampai pencairan dana pinjaman memakan waktu sekitar sebulan.

Setelah pencairan dana, maka selanjutnya adalah proses pengangsuran pinjaman. Berikut penjelasan dari Bapak Dian Susanto, SE.

“Angsuran dibayarkan tiap bulan. Setiap tanggal angsuran, ketua kelompok atau perwakilan kelompok akan menyetorkan angsuran ke kantor upk. Lalu dicatat di kwitansi sebagai bukti pembayaran.”<sup>95</sup>

Bapak Syukron MT selaku Sekretaris menambahkan.

“Di Pakel, diterapkan sistem 4 bulan lunas dan 10 bulan lunas. Angsuran akan disetorkan tiap bulan oleh kelompok SPP ke kantor upk.”<sup>96</sup>

Dari kelompok SPP, Ibu Ariek Setyowati menambahkan.

“Kalau proses pengangsuran, biasanya saya mengumpulkan angsuran anggota. Nanti saya setorkan ke upk tiap bulan.”<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ pada tanggal 23 November 2020

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 3 Desember 2020

Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh menambahkan.

“Kelompok saya sebelum tanggal angsuran tak wa dulu persiapan angsuran. Mundur 2 hari masih dimaklumi, pokok gak ganti bulan.”<sup>98</sup>

Keterangan yang sama didapat dari Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi.

“Setoran pinjamannya tiap bulan mbak, terserah mau pakai yang 4 bulan atau 10 bulan lunas. Tiap bulan setor ke upk.”<sup>99</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa terdapat kelompok SPP dapat memilih jangka waktu 4 bulan atau 10 bulan lunas. Selanjutnya, angsuran anggota kelompok akan dikumpulkan oleh Ketua Kelompok lalu disetorkan. Sebelum tanggal angsuran, Ketua Kelompok akan mengingatkan anggotanya untuk membayar angsuran. Selama tidak sampai berganti bulan, maka telat mengumpulkan angsuran dimaklumi.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika ada anggota yang angsurannya macet hingga berganti bulan? Dari kelompok SPP, Ibu Ariek Setyowati menambahkan.

“Kebetulan selama ini kelompok saya gak pernah telat mbak. Sesuai komitmen jika telat bayar angsuran, pengajuan tahap berikutnya anggota tadi tidak diberi pinjaman lagi.”<sup>100</sup>

Ibu Nurhidayati menambahkan.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 3 Desember 2020

“Alhamdulillah, selama ini lancar mbak. Saya selalu mengingatkan sebelum tanggal angsuran, jaga-jaga supaya tidak ada yang telat bayar.”<sup>101</sup>

Ibu Ida dari Desa Sukoanyar juga menambahkan.

“Kelompok saya tidak pernah telat mbak.”<sup>102</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, jarang terjadi kasus kemacetan di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel. Ketua kelompok selalu mengingatkan para anggotanya untuk membayar tepat waktu.

SPP memberikan bantuan pinjaman agar dapat membantu kelompok ibu-ibu rumah tangga di Pakel. Hambatan atau kendala juga dirasakan oleh anggota terutama ketua kelompok SPP. Ibu Ariek menjelaskan.

“Jumlah pinjamannya terbatas karena per orang hanya bisa pinjam 5jt saja. Lalu kalau ada anggota yang terlambat membayar, ketua kelompok yang ditegur.”<sup>103</sup>

Ibu Nurhidayati juga menambahkan.

“Kalau jadi anggota ngga ada kendala yang berarti mbak. Kalau yang jadi ketua ada, kadang ada yang molor bayar, otomatis yang ditegur kan ketuanya. Alhamdulillah anggota saya orangnya gak ruwet mbak. Dulu pernah salah satu anggota ruwet mbak, yo sempat rewel tapi alhamdulillah udah lunas sekarang. Selagi ketua bisa nangani, pihak bumdes gak turun tangan.”<sup>104</sup>

Katua Kelompok SPP bertanggungjawab untuk mengkoordinir anggotanya setiap angsuran. Keterlambatan yang jumlahnya kecil

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 07 November 2021

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 02 November 2021



dibantu oleh ketua dan anggota kelompok lain, hal ini disebutkan dalam proposal tentang sistem tanggung renteng. Lalu pinjaman yang diberikan oleh BUM Desa Bersama jumlahnya terbatas. Untuk anggota yang baru mengikuti SPP adalah Rp2.000.000,- sedangkan untuk anggota lama atau yang sudah pernah mendapatkan pinjaman sebelumnya sebesar maksimal Rp5.000.000,-. Satu kelompok SPP diberikan pinjaman maksimal sebesar Rp50.000.000,-.

Sewajarnya sebagai sebuah lembaga/institusi yang memberikan akses kemudahan pinjaman, BUM Desa Bersama memerlukan dana agar kegiatan operasionalnya tetap berjalan. Maka dari itu, BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel memerlukan pemasukan untuk menunjang kegiatannya, lalu dari manakah pemasukan/keuntungan yang diperoleh BUM Desa Bersama berasal? Berikut penjelasannya dari Bapak Dian Susanto, SE.

“Keuntungan bumdes didapat dari jasa SPP dan keuntungan unit UP.”<sup>105</sup>

Bapak Syukron MT juga menambahkan.

“Dari jasa dana yang digulirkan, untuk jasa sebesar 18% per tahun flat atau 1,5% per bulan. Sudah ditentukan mulai dari awal program pnpm dahulu.”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, diketahui bahwa BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel menetapkan tambahan jasa atas dana pinjaman yang digulirkan sebesar 18% per tahun atau 1,5% per

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 23 November 2020

bulan. Penentuan besaran jasa ini sudah ditentukan dari awal mula program PNPM di Kecamatan Pakel.

Dari keuntungan yang didapat, bagaimana BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel mengelola hasil jasa tersebut? Bapak Dian Susanto, SE memberikan keterangan.

“Hasil jasa digunakan untuk operasional kegiatan. Lalu sisanya disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Selanjutnya, SHU akan dialokasikan sesuai dengan aturan AD/ART.”<sup>107</sup>

Berikut data alokasi SHU yang berasal dari Laporan Tahunan BUM Desa Bersama.

**Tabel 4.5**

**Rencana Alokasi Kegiatan**

No.	Jenis Kegiatan	Aturan AD/ART
A.	<i>Capacity Building</i>	Min. 15%
B	<i>Reward Perorangan/Pokmas</i>	Max. 5%
C	Desa	Max. 10%
	1. Bagi Hasil ke PAD	Max. 5%
	2. Pendampingan Kepala Desa	Min. 5%
D	<i>Reward Pengurus dan Karyawan</i>	Max. 15%
E	Cadangan Lain	Max. 5%
F	Bantuan Sosial	Min. 15%
G	Pemupukan Modal SPP	Min. 35%
	Pemupukan Modal UP	

Sumber: Rencana Alokasi Kegiatan, 2020<sup>108</sup>

Bapak Dian Susanto, SE memberikan penjelasan tentang alokasi SHU yang tertera dalam tabel di atas.

“*Capacity building* untuk pelatihan atau studi banding ke tempat industri atau usaha. *Reward* perorangan atau pokmas untuk kelompok yang aktif dan tertib, kita kasih *reward* berupa hadiah dalam bentuk barang. Biasanya kita kasih pas acara lpj tutup

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

<sup>108</sup> Laporan Tahunan BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel Tahun 2019

buku. Barangnya biasanya peralatan rumah tangga kayak mesin cuci, lemari es, kipas angin. Cuma karena kelompok kita banyak dan memenuhi syarat untuk *reward* jadi kita pakai sistem undian. Jadi perolehannya tidak sama. Itu untuk ketua kelompok *reward*nya. Selanjutnya untuk bagi hasil untuk Pendapatan Asli Desa (PAD). Lalu pendampingan kepala desa yaitu *reward* yang kita berikan kepada kepala desa sebagai pendamping kelompok SPP yang ada di desa. *Reward* pengurus dan karyawan itu bonus akhir tahun untuk pegawai bumdes. Cadangan lain digunakan kalau ada kejadian *force majour* atau bencana alam. Selanjutnya, SHU juga dialokasikan untuk bantuan sosial. Bantuan ini berupa sembako dan diberikan pada bulan Ramadhan untuk masyarakat Pakel, khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM). Lalu untuk pemupukan modal untuk melestarikan/melanjutkan program-program yang telah berjalan seperti SPP.”<sup>109</sup>

Bapak Syukron MT juga menjelaskan,

“Dari jasa yang masuk, selain untuk operasional kelembagaan juga untuk peningkatan kapasitas pengurus dan kelompok, bagi hasil ke desa dan bantuan sosial untuk rumah tangga miskin. Jadi operasional itu kan untuk keperluan kantor diambil dari sebagian jasa yang masuk.”<sup>110</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa hasil jasa yang diperoleh BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel dikelola untuk operasional kegiatan dan kantor. Setelah dikurangi biaya operasional, sisanya disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU merupakan keuntungan bersih yang telah dikurangi biaya-biaya operasional. Alokasi SHU selanjutnya telah diatur dalam AD/ART, antara lain: 1) *Capacity Building* yaitu peningkatan kapasitas bagi pengurus dan kelompok, 2) *Reward* Peorangan/Pokmas yaitu *reward* bagi kelompok SPP yang aktif dan tertib dalam pembayaran angsuran, 3) Desa (Bagi Hasil ke

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 23 November 2020

PAD dan Pendampingan Kepala Desa), 4) *Reward* Pengurus dan Karyawan yaitu *reward* yang diberikan sebagai bonus akhir tahun karyawan, 5) Cadangan lain merupakan cadangan apabila terjadi kejadian *force majeure* atau seperti kejadian bencana alam, 6) Bantuan Sosial yang diberikan setiap bulan Ramadhan kepada masyarakat Pakel khususnya RTM, dan 7) Pemupukan Modal untuk periode pinjaman selanjutnya.

Lalu apakah dari kelompok SPP mengetahui digunakan untuk apa saja hasil dari tambahan jasa yang mereka bayarkan? Berikut keterangan dari Ibu Ariek Setyowati.

“*Reward* dan bansos. Untuk tambahan modal dan peningkatan kapasitas untuk anggota. Biasanya setahun sekali anggota kelompok diajak mengunjungi tempat produksi olahan makanan atau usaha lain yang bisa untuk direplika oleh anggota kita.”<sup>111</sup>

Ibu Nurhidayati menambahkan.

“Setau saya untuk bansos tiap bulan puasa. Ada *reward* juga untuk ketua kelompok. Trs tiap ketua kelompok dapet seragam dari bumdes, tiap awal tahun dapat kalender.”<sup>112</sup>

BUM Desa Bersama melaporkan hasil dari kegiatan SPP dalam satu periode dan dilaporkan dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Beberapa perwakilan kelompok SPP juga diundang mengikuti acara tersebut. Maka sebagian dari kelompok SPP mengetahui tentang penggunaan hasil jasa dan sebagian tidak.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata pada tanggal 07 November 2021

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh pada tanggal 02 November 2021

Setelah diketahui apa saja syarat, mekanisme dan pengelolaan yang dilakukan BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel dalam menyalurkan dana pinjaman bergulir, bagaimanakah respon masyarakat sendiri terhadap program SPP di Pakel? Berikut keterangan dari Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang.

“Alhamdulillah, saya merasa terbantu dengan pinjaman SPP. Alasan saya bergabung untuk tambah modal usaha peternakan. Anggota kelompok saya ada yang jual makanan, ada yang pertanian. Jadi pinjaman SPP itu untuk tambahan modal. Dengan pinjaman modal kami bisa bertahan dan usaha lebih maju.”<sup>113</sup>

Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh juga memberikan keterangan.

“Setelah dapat pinjaman, keadaan perekonomian saya membaik. Alhamdulillah. Saya pinjam untuk modal usaha, buat bantu suami mbak. Dulu pernah ikut ternak puyuh mbak, terus kena hama tikus. Sekarang suami ikut pemborong las di Jakarta. Aku di rumah ternak ayam sama *mentok*, sama jahit. Kelompok saya juga ada yang untuk usaha toko, ada yang ternak, ada yang petani, ada yang ikut gergaji batu modal awal buat beli alatnya, tiap minggu dapat gaji.”<sup>114</sup>

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar menambahkan.

“Iya mbak, saya dan teman-teman pinjam untuk menambah modal usaha.”<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar pada tanggal 3 Desember 2020

Dari keterangan pada Ketua Kelompok SPP di atas, mereka dan anggota kelompoknya merasa terbantu dengan adanya pinjaman SPP. Motivasi utama para ibu-ibu tersebut meminjam adalah untuk modal usaha dan membantu suami. Dengan memanfaatkan pinjaman dana bergulir, mereka dapat menambah modal usaha, membeli alat penunjang kerja, atau menambah usaha baru untuk mencari nafkah.

**Tabel 4.6**

**Penghasilan Per Bulan Kelompok SPP Humairoh**

No.	Nama	Jenis Usaha	Keuntungan Usaha	Kebutuhan Rumah Tangga	Operasional Usaha
			Per Bulan		
1.	Nurhidayati	Peternakan	1.500.000	1.100.000	300.000
2.	Sumini	Pedagang	1.300.000	900.000	200.000
3.	Marsini	Peternakan	1.600.000	1.100.000	300.000
4.	Yatini	Pertanian	1.700.000	1.300.000	450.000
5.	Muayatun	Pertanian	1.100.000	1.000.000	150.000

Sampai sekarang, banyak masyarakat Pakel yang bergabung dengan kelompok SPP dan mendapatkan pinjaman dari BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Berikut data nama kelompok SPP dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel.

**Tabel 4.7**

**Data Pinjaman Kelompok SPP di Kecamatan Pakel**

**(Desember 2019)**

No.	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman	No.	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman
	<b>Sambitan</b>		71.	Cempaka	21.000.000
1.	Mulyo	10.000.000	72.	Rosella	28.000.000
2.	Sekar	10.000.000	73.	Cempaka II	23.000.000

3.	Utomo	12.000.000	74.	Dewi Sri	30.000.000
4.	Sedap Malam	11.000.000		<b>Pakel</b>	
5.	Feminim Jaya	10.000.000		<b>Suwaluh</b>	
6.	Mentari	12.000.000	75.	Saren Sido Makmur	20.000.000
7.	Princess	10.000.000	76.	Humairoh	15.000.000
	<b>Bono</b>		77.	Arrohmah	20.000.000
8.	Kemuning	5.000.000	78.	Al Barokah	12.000.000
9.	Kartika	10.000.000	79.	Al Hikmah	31.000.000
10.	Asri	10.000.000	80.	Davina II	25.000.000
11.	Sakura	25.000.000	81.	Davina III	30.000.000
12.	Asri	25.000.000	82.	Al Amien	35.000.000
13.	Paprika	40.000.000	83.	Himalaya	17.500.000
	<b>Sukoanyar</b>		84.	Saren Mulya	19.000.000
14.	Maju Terus	50.000.000	85.	Saren Tani	12.000.000
15.	Jaya Makmur	41.000.000	86.	Sakura	33.000.000
16.	Fatimah	32.000.000	87.	Saren Jaya	40.000.000
17.	Srikandi	45.000.000	88.	Amanah	45.000.000
18.	Mawar	25.000.000	89.	Mawar Biru	40.000.000
19.	Melati	19.000.000		<b>Pecuk</b>	
20.	Bunda Mandiri	27.000.000	90.	Artogemi I	40.000.000
21.	Umbrella	45.000.000	91.	Artogemi II	40.000.000
22.	Sumber Makmur	40.000.000	92.	Fatonah	47.000.000
23.	Arimbi	30.000.000	93.	Siti Aminah	34.000.000
24.	Makmur	22.000.000	94.	Siti Khodijah	35.000.000
	<b>Duwet</b>			<b>Bangunmulyo</b>	
25.	Dahlia	32.000.000	95.	Iqro'	22.000.000
26.	Batu Indah	12.000.000	96.	Melati	45.000.000
27.	Palem	14.000.000	97.	Yasin	30.000.000
	<b>Tamban</b>		98.	Mukti	23.000.000
28.	ABC	30.000.000	99.	Iqro'	50.000.000
29.	Mapan	30.000.000	100.	Amanah	32.000.000
30.	Banowati	50.000.000	101.	Kenari	43.000.000
31.	Matahari	50.000.000	102.	Seruni	35.000.000
32.	Srikandi	50.000.000		<b>Kasreman</b>	
33.	Kamboja I	50.000.000	103.	Maju Mapan	14.000.000
34.	Kamboja II	50.000.000	104.	Sri Rejeki	47.000.000
35.	Lili	50.000.000	105.	Mitra Karya	50.000.000
36.	Alam	50.000.000	106.	Barokah	18.000.000
37.	Cahaya	45.000.000	107.	Seroja	23.000.000
38.	Akik Barokah	40.000.000	108.	Sariasih	29.000.000
39.	Purnama Indah	25.000.000		<b>Sanan</b>	
40.	Arimbi	50.000.000	109.	Indah	40.000.000
41.	Gandhari	50.000.000	110.	Bogenvil	31.000.000
42.	Anggrek	50.000.000	111.	Melati	50.000.000
	<b>Ngebong</b>			<b>Bangunjaya</b>	

43.	Jetis I	50.000.000	112.	Bunga Sepatu	22.000.000
42.	Jetis II	50.000.000	113.	Kebon	25.000.000
43.	Bintang	40.000.000	114.	Cemara	33.000.000
44.	Matahari I	50.000.000	115.	Banyuireng	39.000.000
45.	Matahari II	50.000.000		<b>Ngrance</b>	
46.	Selipan I	46.000.000	116.	Tani Jaya	28.000.000
47.	Selipan II	42.000.000	117.	Tani Mulyo	24.000.000
48.	Sembung I	50.000.000	118.	Pasar I	48.000.000
49.	Sembung II	50.000.000	119.	Pasar II	38.000.000
50.	Mindi I	50.000.000		<b>Gebang</b>	
51.	Mindi II	50.000.000	120.	Peternak	36.000.000
52.	Mindi III	50.000.000	121.	Melati	30.000.000
53.	Bintang I	50.000.000		<b>Gesikan</b>	
	<b>Sodo</b>		122.	Rowo Barokah	15.000.000
54.	Pelem Raya	9.000.000	123.	Al Khodijah	44.000.000
55.	Hidayah	20.000.000	124.	Rowo Barokah II	13.000.000
56.	Dahlia	30.000.000	125.	Al Khodijah I	28.000.000
57.	Pelem Ayu	20.000.000	126.	Azzahra	40.000.000
58.	Jujur	18.000.000	127.	Al Khodijah II	26.000.000
59.	Sakura	24.000.000		<b>Gempolan</b>	
60.	Tani Maju	29.000.000	128.	Lancar Jaya	37.000.000
61.	Delima	16.000.000	129.	Anggrek	25.000.000
	<b>Gombang</b>		130.	Melati	39.000.000
62.	Banaran I	32.000.000	131.	Yasin Kalipakis	50.000.000
63.	Dahlia	26.000.000	132.	Kasih Ibu	40.000.000
64.	Karunia	25.000.000	133.	Anggrek Ratna	50.000.000
65.	Permata	32.000.000	134.	Yasin I	50.000.000
66.	Gayatri	50.000.000	135.	Yasin II	50.000.000
67.	Anugerah	35.000.000	136.	Kasih Bunda	50.000.000
68.	Banaran II	35.000.000	137.	Mawar I	35.000.000
69.	Anugerah II	20.000.000	138.	Mawar II	30.000.000
70.	Melati	20.000.000	139.	Latulip	42.000.000
			140.	Latulip II	19.000.000

Sumber: Data SPP Tahun 2019<sup>116</sup>

## 2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengelolaan Hasil Jasa di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel

<sup>116</sup> Laporan Pinjaman SPP BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel Tahun 2019



Penciptaan perempuan dari unsur dan jenis yang sama dengan laki-laki, sehingga memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol dalam berbagai bidang kehidupannya, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain. Maka tidak ada yang menghalangi perempuan untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki seperti dalam hal bekerja, berprofesi, bahkan menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu negara.<sup>117</sup> Bapak Dian Susanto, SE menjelaskan.

“Perempuan juga bisa bekerja atau berusaha sebagaimana laki-laki untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka dapat berdiri sejajar dan saling bekerja sama dalam hal pekerjaan. Lalu kita menimbang program pemberdayaan yang dikhususkan untuk perempuan karena dalam urusan keuangan kelihatannya lebih aman. Dari segi pengelolaan keuangan, kebanyakan perempuan dapat mengatur lebih baik.”<sup>118</sup>

Bapak Syukron MT menambahkan.

“Perempuan juga bisa membantu perekonomian keluarga. Saya rasa ibu-ibu bisa memanfaatkan pinjaman dengan baik.”<sup>119</sup>

Pemberdayaan perempuan selaras dengan Islam, karena perempuan dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam memikul tanggungjawab beragama. Islam menjelaskan persamaan derajat antar sesama umat manusia. Dalam Allah SWT berfirman:

---

<sup>117</sup> Rizqi Mungfarida, Skripsi: “Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur’an”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hal. 2

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 07 November 2021

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 09 November 2021

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Al-Hujurat: 13)<sup>120</sup>

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang menjalankan kegiatan perekonomian berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits. Tujuan utamanya adalah kemashlahatan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun ekonomi memiliki beberapa tujuan, antara lain:<sup>121</sup>

- a. Pencapaian *falah*
- b. Distribusi sumber-sumber ekonomi
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar
- d. Menegakkan sosial ekonomi Islam dalam masyarakat
- e. Persaudaraan dan kesatuan

Lalu bagaimanakah perspektif Islam terhadap kegiatan SPP di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel? Apakah sejalan dengan sistem ekonomi Islam? Berikut penjelasan dari Bapak Dian Susanto, SE.

<sup>120</sup> Al-Qur’an, 49:13

<sup>121</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: KENCANA, 2017), hal. 173

“Kita tidak menggunakan sistem Islam, tapi kalau dilihat dari tujuan sesuai karena membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat.”<sup>122</sup>

Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama menjelaskan,

“Sepertinya sih iya. Ya mungkin di SPP anggota kelompok mempunyai modal dari SPP untuk mengembangkan usaha produktif, ketika usaha berkembang, kesejahteraan kan dapat dicapai, perekonomian juga berputar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalo segi persaudaraan dan kesatuan itu kan yang diharuskan dalam SPP karena harus berkelompok, dan pada akhirnya pun hasil usaha dari SPP juga kembali kepada masyarakat/anggota berupa bantuan dari SHU. Mungkin kayak gitu.”<sup>123</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa walaupun tidak menggunakan sistem ekonomi Islam tapi tujuan program SPP sama dengan ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selanjutnya dari tambahan jasa sebesar 1,5%, sistem pemungutannya seperti bunga. Sedangkan dalam Islam, bunga dilarang karena termasuk ke dalam riba. Riba diharamkan karena merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Lalu apakah masyarakat merasa keberatan dan dirugikan dengan tambahan jasa tersebut? Bapak Dian Susanto, SE menjelaskan.

“Persentase tambahan jasa 1,5% sudah ditentukan lewat musyawarah. Tentu dengan pertimbangan tidak memberatkan nasabah nantinya. Jadi tidak akan memberatkan masyarakat yang mengajukan.”

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Dian Susanto, SE selaku Ketua Operasional BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 10 Desember 2020

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Syukron MT selaku Sekretaris BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tanggal 23 November 2020

Bapak Syukron MT juga menambahkan.

“Tambahkan jasa tersebut tidak akan memberatkan, apalagi nanti kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan *reward* untuk kelompok SPP.”

Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Ibu Ariek selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang menjelaskan,

“Tidak memberatkan mbak, karena dari jasa itu juga dikembalikan sebagian ke anggota misal untuk pembagian paket sembako ke semua anggota dan *reward* untuk kelompok yang membayar tepat waktu.”<sup>124</sup>

Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh juga menambahkan.

“Mboten, tiap bulan puasa tiap anggota dapat bansos berupa sembako mbak.”<sup>125</sup>

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi juga memberikan keterangan.

“Tidak, karena persyaratannya tidak ribet cuma KTP dan kepercayaan sesama anggota.”<sup>126</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa masyarakat tidak keberatan dengan 1,5%. Apalagi sebagian dari hasil tambahan jasa akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial berupa paket sembako dan *reward* bagi kelompok-kelompok yang angsurannya tepat waktu. Sebagian juga tidak keberatan karena

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ibu Ariek Setyowati selaku Ketua Kelompok SPP Permata dari Desa Gombang pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>125</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhidayati selaku Ketua Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh pada tanggal 3 Desember 2020

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok SPP Arimbi dari Desa Sukoanyar pada tanggal 3 Desember 2020

memang persyaratannya tidak sulit, dengan kata lain masyarakat mudah memperoleh akses pinjaman modal di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel.

### **C. Hasil Analisis Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil wawancara para narasumber, ditemukan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

#### **1. Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengelolaan Hasil Jasa di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel**

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk membangun usaha perempuan ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pemberdayaan merupakan kegiatan pelatihan dan pembejarian yang bertujuan agar perempuan mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan perempuan berdasar dari kesetaraan gender bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama termasuk dalam perekonomian.

Mayoritas kaum perempuan di kecamatan Pakel memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam menyerap informasi dan wawasan baru. Maka dari itu perlu diadakannya pemberdayaan bagi perempuan di kecamatan Pakel agar

dapat memperbarui kemampuan dan wawasan baru dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditujukan untuk memberdayakan ibu rumah tangga di pedesaan. SPP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan untuk memenuhi dasar ekonomi. Pinjaman dana bergulir tersebut disalurkan oleh BUM Desa Bersama kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program Simpan Pinjam (SPP) merupakan kegiatan pemberian pinjaman modal di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Program ini merupakan salah satu program awal PNPM-Mpd di Kecamatan Pakel. Kemudian pada tahun 2018 resmi berubah menjadi BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel dan tetap dilanjutkan hingga sekarang. Keegiatannya berupa pemberian pinjaman dana bergulir bagi kelompok perempuan. Program ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga dan pendanaan usaha, memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Pengenalan program SPP ke masyarakat dilakukan lewat sosialisasi oleh pihak BUM Desa Bersama ke desa-desa. Sebagian masyarakat mengenal SPP dari sosialisasi, sebagian lagi mendengar dari mulut ke mulut.

Upaya yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok perempuan dengan mengadakan pelatihan dan kunjungan usaha. Pihak BUM Desa Bersama memfasilitasi kegiatan pelatihan atau kunjungan usaha yang diikuti oleh kelompok SPP. Untuk kegiatan pelatihan atau kunjungan, terdapat alokasi dana sendiri dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Lewat pelatihan atau kunjungan usaha, kelompok ibu rumah tangga di Pakel dapat menambah keterampilan dan kemampuan dalam berusaha. Pelatihan dan kunjungan yang pernah diadakan di Pakel antara lain:

- a. Kunjungan ke Kampung Coklat
- b. Kunjungan ke Jenang Lasimun
- c. Kunjungan ke Peternakan
- d. Pelatihan Menjahit
- e. Pelatihan Membordir
- f. Pelatihan Pengolahan Makanan

Pelatihan dan kunjungan usaha yang dilakukan diharapkan dapat membuka pandangan atau pola pikir kaum perempuan di kecamatan Pakel. Juga menambah keterampilan dan kemampuan yang dapat dijadikan usaha untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Upaya selanjutnya adalah dengan dilakukan pendampingan oleh BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel kepada kelompok SPP. Pendampingan yang dimaksud adalah dengan memantau usaha-usaha

yang dijalankan oleh kelompok SPP. Pihak BUM Desa Bersama mencoba memahami apa yang dibutuhkan oleh kelompok SPP untuk melancarkan usaha-usaha anggota kelompok SPP. Jika kelompok SPP banyak memiliki usaha ternak, pihak BUM Desa Bersama akan memfasilitasi pelatihan pengolahan pakan ternak. Berdasarkan hasil keterangan kelompok SPP, pendampingan ini berupa pemantauan kegiatan pinjaman yang dilakukan kelompok SPP. Dari mulai pengajuan proposal sampai pelunasan.

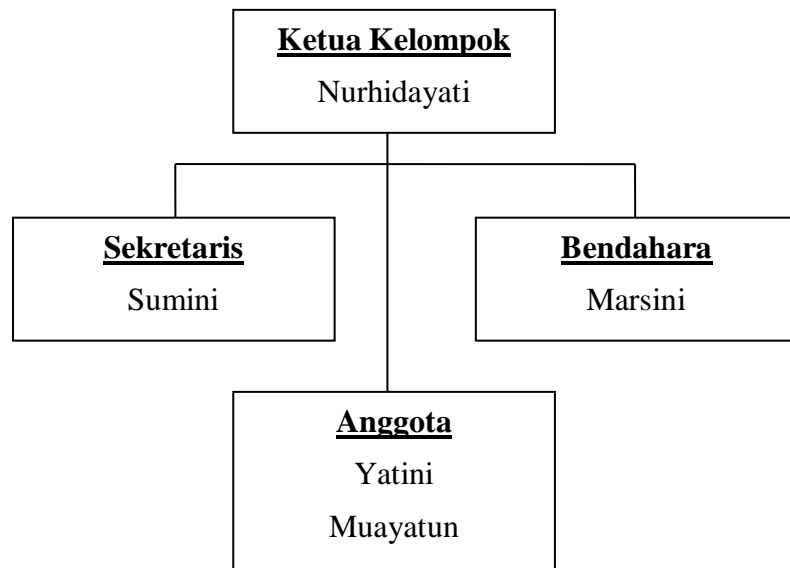
Masyarakat yang tertarik untuk mengajukan pinjaman SPP harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman. Berdasarkan hasil temuan peneliti, berikut adalah syarat-syaratnya:

a. Syarat Pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1) Membentuk Kelompok SPP

Untuk mengajukan pinjaman SPP, para ibu rumah tangga harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok minimal beranggotakan dari lima orang yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara dan anggota kelompok.





**Gambar 4.2 Struktur Kelompok SPP Humairoh dari Desa Suwaluh<sup>127</sup>**

2) Mendapatkan Ijin dari Suami

Ijin suami diperlukan karena suami bertindak sebagai penjamin pinjaman.

3) Bekerja/Memiliki Usaha

Masyarakat paling tidak bekerja atau memiliki usaha walaupun levelnya kecil-kecilan untuk bisa mengajukan pinjaman SPP.

b. Mekanisme Pengajuan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Setelah memenuhi syarat, maka tahap selanjutnya adalah mekanisme pengajuan pinjaman SPP ke BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Berikut penjelasannya:

<sup>127</sup> Hasil Wawancara

### 1) Pengajuan Proposal Pinjaman

Setelah membentuk kelompok SPP, maka selanjutnya membuat proposal pinjaman kelompok SPP dan diajukan ke BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Proposal pinjaman berisi informasi tentang latar belakang kelompok dan masing-masing anggota. Mulai dari identitas kelompok, identitas anggota, pekerjaan, pendapatan dalam sebulan, persyaratan fotocopy KTP suami dan istri, dan jumlah pinjaman yang diajukan.

### 2) Tahap Verifikasi

Setelah proposal pinjaman diterima oleh BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel, selanjutnya proposal akan diperiksa secara administratif. Jika proposal sudah dianggap sesuai dengan ketentuan, maka selanjutnya diverifikasi secara langsung oleh Tim Verifikasi dari pihak BUM Desa Bersama. Kegiatan verifikasi merupakan survei lapangan terhadap kelompok-kelompok SPP yang telah mengajukan proposal. Tim verifikasi akan mengecek kebenaran informasi yang tercantum dalam proposal. Hal-hal yang perlu diperiksa oleh tim verifikasi antara lain:

- a) Pemeriksaan identitas kelompok, meliputi nama, struktur pengurus, jumlah dana pinjaman yang diajukan, informasi tentang masing-masing anggota kelompok.

- b) Wawancara langsung dengan anggota kelompok.
  - c) Membuat kesimpulan hasil verifikasi.
  - d) Membuat hasil rekomendasi dari kegiatan verifikasi.
- 3) Tahap Pencairan Dana

Selanjutnya, setelah tahap verifikasi adalah tahap pencairan dana. Hasil rekomendasi dari tim verifikasi akan diberikan kepada tim pencairan dana dan dirundingkan. Hasil musyawarah dari tim pencairan dana akan menjadi dasar keputusan pencairan dana bagi kelompok-kelompok SPP yang telah dianggap layak menerima pinjaman. Dana akan diberikan langsung oleh tim pencairan dana ke kelompok-kelompok SPP.

Demikian persyaratan dan mekanisme pengajuan pinjaman SPP. Proses dan persyaratan yang tidak sulit, memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Ditambah untuk mengajukan pinjaman dana bergulir, tidak mensyaratkan masyarakat untuk menyerahkan agunan. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mengajukan pinjaman SPP.

Kelompok-kelompok SPP yang telah mendapatkan pinjaman dapat memilih jangka waktu 4 bulan atau 10 bulan lunas. Masyarakat mulai mengangsur setelah mendapatkan dana pinjaman. Pembayaran angsuran akan dikoordinir oleh Ketua Kelompok SPP, dan disetorkan

pada tanggal angsuran tiap bulan. Anggota yang telat membayar beberapa hari, masih bisa dimaklumi asal tidak sampai berganti bulan.

Apabila ada anggota yang macet angsurannya, pihak BUM Desa Bersama tidak langsung turun tangan. Keterlambatan ditangani oleh ketua kelompok terlebih dahulu. Jika nominal tunggakannya rendah, angsurannya dibantu oleh ketua kelompok dan anggota yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dalam proposal di mana menggunakan sistem tanggung renteng yaitu jika ada anggota yang kesulitan membayar akan dibantu bersama oleh kelompoknya. Ketua kelompok bertanggungjawab atas angsuran anggotanya, maka masing-masing kelompok harus bekerja sama untuk melunasi pinjaman SPP. Selain itu, dalam kegiatan pelatihan atau kunjungan, biasanya hanya perwakilan dari kelompok SPP atau ketuanya. Karena terbatasnya modal yang dimiliki BUM Desa Bersama dibandingkan dengan banyaknya anggota kelompok SPP. Hal ini juga menyebabkan terbatasnya pinjaman yang dapat diberikan kepada masing-masing anggota yaitu maksimal Rp5.000.000 per orang.

Dalam setiap kegiatan simpan pinjam, biasanya pihak yang memberikan pinjaman akan mensyaratkan tambahan atau bunga yang merupakan keuntungan karena telah memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel juga menetapkan tambahan jasa dalam pinjaman SPP.

Maka dalam proses pengangsuran, kelompok SPP akan mengembalikan pokok pinjaman beserta tambahan jasa sebesar 1,5% kepada BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Tambahan jasa tersebut merupakan keuntungan yang diambil oleh pihak BUM Desa Bersama untuk menutup biaya-biaya yang perlu dikeluarkan agar kegiatan operasional BUM Desa Bersama tetap berjalan. Setelah dikurangi biaya-biaya operasional, maka sisanya disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU merupakan keuntungan bersih BUM Desa Bersama yang selanjutnya akan dialokasikan untuk beberapa hal, antara lain:

a. *Capacity Building*

*Capacity building* merupakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dengan dana SHU, BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel mengadakan kegiatan studi banding dan pelatihan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat kecamatan Pakel. BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel telah melakukan studi orientasi ke berbagai tempat, seperti tempat kerajinan, industri kecil dan peternakan. Pelatihan yang sudah pernah dilakukan seperti pelatihan membuat kue, menjahit, dan membordir.

b. *Reward Peorangan/POKMAS*

*Reward* perorangan dan POKMAS (Kelompok Masyarakat) merupakan *reward* yang diberikan BUM Desa Bersama 'Ngudi

Luhur' Pakel kepada kelompok SPP. *Reward* akan diberikan kepada kelompok aktif dan tertib. *Reward* ini berupa hadiah dalam bentuk barang yang akan diberikan ketika tutup buku. Barang yang diberikan biasanya peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, dan lain-lain. Namun, karena banyaknya kelompok SPP yang memenuhi syarat dan tidak mungkin memberikan *reward* kepada semua kelompok, maka *reward* dilakukan dengan sistem undian. Kelompok yang memenuhi syarat akan diundi oleh BUM Desa Bersama dan hadiah diberikan kepada Ketua Kelompok SPP sebagai koordinator kelompok.

c. Desa

1) Bagi Hasil ke PAD

Sebagai unit khusus yang mengelola dana PNPM, BUM Desa Bersama bertanggung jawab atas pengembangan potensi desa. Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan BUM Desa Bersama, sebesar maksimal 5% akan dialokasikan sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa).

2) Pendampingan Kepala Desa

Kepala Desa berperan sebagai pendamping kelompok SPP di desa-desa di kecamatan Pakel. Maka dari itu, Kepala Desa mendapatkan alokasi dari SHU sebesar minimal 5% dari SHU.

d. *Reward* Pengurus dan Karyawan

Peran pegawai dan karyawan BUM Desa Bersama sangatlah penting bagi berjalannya kegiatan di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Setiap pengurus memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam menjalankan kegiatan tersebut. Maka setiap akhir periode, SHU akan dialokasikan sebesar maksimal 15% untuk bonus bagi para pegawai dan karyawan. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pegawai dan karyawan atas kinerjanya selama tahun tersebut.

e. Cadangan Lain

Cadangan lain merupakan alokasi SHU yang diperuntukkan kejadian *force majeure*, yaitu kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa pihak yang bersangkutan dalam kontrak. Seperti misalnya terjadi bencana alam.

f. Bantuan Sosial

Setiap bulan Ramadhan, BUM Desa Bersama akan memberikan bantuan sosial baik bagi peminfaat pinjaman dana bergulir dari BUM Desa Bersama maupun bukan, khususnya untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) di kecamatan Pakel. Bantuan ini berupa paket sembako yang didistribusikan di 19 desa di kecamatan Pakel. Alokasi untuk bantuan sosial sebesar minimal 15%.

g. Pemupukan Modal

Sebagian besar SHU akan dialokasikan untuk kegiatan pinjaman dana bergulir di tahun selanjutnya. Hal ini penting untuk keberlangsungan kegiatan pinjaman di BUM Desa Bersama agar tetap berjalan. Alokasinya sebesar minimal 35%.

Hasil penggunaan jasa juga akan dilaporkan dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diikuti oleh perwakilan kelompok SPP. Maka sebagian dari kelompok SPP mengetahui penggunaan tambahan jasa yang mereka bayarkan yang juga sebagian akan kembali kepada mereka dalam bentuk *reward* dan bantuan sosial.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel membantu kaum perempuan mendapatkan akses pinjaman yang mudah, pelatihan dan kunjungan usaha untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan, serta pendampingan usaha-usaha yang dimiliki oleh kelompok SPP.

## **2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengelolaan Hasil Jasa di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel**

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan memberikan bantuan pinjaman, pelatihan dan pendampingan usaha dapat membantu mengatasi kemiskinan di pedesaan. Pemberdayaan bagi diri perempuan meningkatkan kualitas



dan kemajuan kaum perempuan dengan adanya kemandirian dan membantu perekonomian rumah tangga. Islam memandang perempuan sebagai bagian yang sama pentingnya dengan laki-laki. Allah tidak memandang manusia berdasarkan perempuan atau laki-laki tetapi atas dasar ketakwaan manusia. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Al-Hujurat: 13)<sup>128</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*, merupakan agama yang berpihak pada perempuan. Islam tidak menghalangi perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya asal dalam pekerjaannya tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Bahkan Islam sangat menekankan baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya yang mengarah kepada kebaikan bersama.

Peran perempuan di tengah masyarakat pada hakekatnya adalah membantu keluarga dalam mencapai sejahtera. Dengan kata lain, peran perempuan melalui pemberdayaan adalah untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga atas dasar semangat saling tolong-menolong dalam kebaikan.

---

<sup>128</sup> Al-Qur’an, 49:13

Islam diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk kemashlahatan umat manusia. Allah telah menciptakan berbagai aturan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Kegiatan SPP di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel termasuk ke dalam kegiatan bermuamalah dalam ekonomi Islam. pemberian pinjaman merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta’awun* (tolong-menolong). Dengan demikian pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai ibadah sosial. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2)<sup>129</sup>

Selain pemberian pinjaman, BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel juga mengadakan pelatihan atau kunjungan usaha dan pendampingan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan kelompok ibu rumah tangga dalam berwirausaha. Pelatihan dan kunjungan usaha yang dilakukan di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel bertempat di kecamatan Pakel dan di desa-desa yang ada di kecamatan Pakel sesuai permintaan ibu-ibu kelompok SPP, karena setiap wilayah memiliki permintaan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing. Pendampingan juga dilakukan dalam

---

<sup>129</sup> Al-Qur’an 5:2

kegiatan SPP agar kelompok SPP dapat membuka usahanya sendiri. Seluruh kegiatan pemberdayaan perempuan ini dilakukan karena kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan meningkatkan perekonomian.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.*” (Ar-Ra’d: 11)<sup>130</sup>

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang menjalankan kegiatan perekonomian berlandaskan nilai-nilai dan prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits. Tujuan utamanya adalah kemashlahatan atau kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan ekonomi Islam secara umum antara lain:<sup>131</sup>

- a. Pencapaian *falah*
- b. Distribusi Sumber-sumber ekonomi
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar
- d. Menegakkan sosial ekonomi Islam dalam masyarakat
- e. Persaudaraan dan kesatuan

Tujuan dalam ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai dalam program SPP. Tujuan umum dalam program SPP adalah mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, memberikan kemudahan akses pendanaan bagi masyarakat

<sup>130</sup> Al-Qur’an, 13:11

<sup>131</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: KENCANA, 2017), hal. 173

desa, pemenuhan kebutuhan dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM). Karena program SPP merupakan program dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan, maka program tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan bagi masyarakat di pedesaan, khususnya RTM. Dengan kemudahan akses pinjaman SPP, masyarakat dapat mengembangkan usaha produktif, perekonomian juga berputar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Walaupun tidak menggunakan sistem ekonomi Islam, tetapi program SPP memiliki tujuan yang sejalan dengan Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), BUM Desa Bersama menetapkan tambahan jasa sebesar 1,5% setiap bulan. Kelompok SPP setiap bulan akan menyetorkan angsuran pokok ditambah dengan tambahan jasa. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam Islam, tambahan tidak boleh dijadikan syarat dalam pengembalian hutang piutang, karena hal tersebut termasuk ke dalam riba. Riba telah dilarang dalam Islam karena menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak lainnya. Akan tetapi, masyarakat yang menerima bantuan pinjaman modal bergulir sama sekali tidak keberatan dengan tambahan jasa tersebut, karena mereka merasa terbantu dengan adanya pinjaman SPP.

Jika dilihat dari pengelolaan jasa oleh BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel, maka diketahui sebagian besar jasa digunakan

untuk operasional kegiatan BUM Desa Bersama dan pelestarian program pinjaman. Sebagian lagi digunakan sebagai bantuan sosial dan *reward* untuk kelompok yang aktif, serta insentif bagi kelompok yang membayar tepat waktu. Dari penggunaannya, jelas bahwa tidak digunakan untuk keuntungan BUM Desa Bersama pribadi, tapi juga sebagian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan, IPTW dan *reward*. Keuntungan yang didapat BUM Desa Bersama pun sebagian besar digunakan operasional agar kegiatan pinjaman dana bergulir dapat terus berjalan.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari beberapa anggota kelompok SPP, mereka menjelaskan bahwa banyak dari anggota kelompok tidak keberatan dengan besaran biaya jasa yang ditetapkan dalam pinjaman SPP. Maka tambahan jasa di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel diperbolehkan. Walaupun tidak menggunakan sistem bagi hasil sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, tambahan jasa tersebut tidak memberatkan masyarakat dan memang sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat.

Dalam surah An-Nisaa’ dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

*membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisaa’: 29)<sup>132</sup>*

Menurut ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebaliknya, Allah membolehkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel diperbolehkan karena telah banyak membantu masyarakat.

---

<sup>132</sup>Al-Qur’an, 4:29